

Judul : Jaga Profesionalitas BIN
Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Jaga Profesionalitas BIN

Herindra bakal dilantik sebagai kepala Badan Intelijen Negara bersamaan dengan pelantikan menteri di kabinet Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS — Pergantian Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN dari Budi Gunawan ke Muhammad Herindra di pengujung pemerintahan Joko Widodo berjalan mulus. DPR akan segera membawa hasil uji kelayakan dan kepatutan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (17/10/2024) untuk menerima usulan pengangkatan kepala BIN yang baru tersebut. Dengan demikian, kepala BIN dapat dilantik bersamaan dengan menteri di kabinet Prabowo Subianto.

Herindra tiba di ruang rapat Komisi I DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10) sekitar pukul 11.00 WIB.

Rapat tertutup sekitar 2 jam tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan empat Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula 18 perwakilan dari delapan fraksi di DPR.

Sesuai uji kelayakan tersebut, Puan Maharani mengatakan, pimpinan DPR dan perwakilan dari delapan fraksi di DPR telah bersepakat menyatakan Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN yang disetujui DPR. Namun, ia tidak menerangkan pertimbangan-pertimbangan DPR yang mendasari kesepakatan itu.

"Kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang nantinya akan dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti, yaitu presiden yang akan datang, Presiden Prabowo Subianto," ujar Puan.

Tahap berikutnya, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk meminta persetujuan seluruh anggota DPR pada Kamis (16/10). Setelah rapat paripurna, pimpinan DPR akan ber-



Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengikuti uji kelayakan dan kepatutan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di hadapan pimpinan DPR dan perwakilan delapan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024). Penggantian kepala BIN dilakukan di pengujung pemerintahan Presiden Joko Widodo agar kepala BIN yang baru dapat dilantik bersamaan dengan menteri di kabinet Prabowo Subianto.

surat kepada pemerintah terkait pelantikan Herindra sebagai kepala BIN.

"Insya Allah paripurna untuk menyatakan terkait dengan kecapaian bahwa calon kepala BIN yang akan datang ini, kita akan lakukan paripurnanya besok, hari Kamis, ya," kata Puan.

Pelantikan

Saat ditanya apakah pelantikan akan dilakukan pada 21 Oktober, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah.

Secara terpisah, Dasco mengatakan, kemungkinan pelantikan Herindra sebagai kepala BIN akan dilakukan bersamaan dengan para menteri di kabinet Prabowo. "Kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 Oktober," ujar Dasco.

Puan mengatakan, anggota DPR dan pimpinan DPR meminta kepada Herindra untuk tetap menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Di bawah ke-

pimpinan Herindra, BIN diharapkan bisa bekerja secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta selalu bersikap netral.

"Bagaimana sebagai tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral, kemudian tetap saja bekerja untuk bukan ke dalam saja, tetapi juga menjaga tugas tupoksinya itu untuk keluar," kata Puan.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Muhammad Sarmuji menyampaikan harapan senada. Ia

bersama perwakilan fraksi DPR yang lain mengingatkan agar BIN bisa menjaga keutuhan NKRI dan bekerja profesional sesuai dengan tupoksi BIN. Lembaga intelijen itu, lanjutnya, harus berorientasi pada kepentingan negara.

"Secara garis besar ada pesan-pesan untuk bangsa dan negara, tentang BIN dan sebagainya," ujar Sarmuji.

Adapun Herindra menyampaikan, BIN harus bisa berkolaborasi dengan semua pe-

mangku kepentingan yang ada. "Intinya, kita harus menjaga keutuhan negara Republik Indonesia," kata Herindra. Menurut peneliti Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, Herindra memiliki kompetensi yang kuat untuk menjadi kepala BIN. Selain berpengalaman sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Herindra juga pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus.

Di sisi lain, hampir semua

fraksi di DPR saat ini merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo. Mereka pun paham bahwa Herindra merupakan calon yang diinginkan Prabowo sehingga akan memberikan persetujuan dengan mudah. Apalagi, parpol juga memahami kebutuhan dari Prabowo agar kepala BIN yang baru dapat dilantik bersamaan dengan menteri.

Tantangan

Lebih jauh, Khairul menuturkan, tantangan Herindra untuk memimpin BIN tidak mudah. Herindra harus mampu memastikan kondisi internal BIN tetap kondusif. BIN ke depan harus menjadi lembaga intelijen yang berorientasi pada kepentingan negara. Penggunaan seragam yang belakangan makin sering digunakan oleh personel BIN harus dievaluasi untuk menjaga prinsip kerahasiaan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan, alasan dirinya mengajukan pemberhentian Kepala BIN Budi Gunawan kepada DPR atas permintaan dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Proses pemberhentian Budi Gunawan ini disebut hanya masalah administrasi. Dengan demikian, pelantikan kepala BIN yang baru nantinya akan berbarengan dengan pelantikan para menteri yang baru.

"Oh, itu administrasi saja. Administrasi artinya karena kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada 21 (Oktober) sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo, itu atas permintaan dari Pak Prabowo," kata Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan pers di sela kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Rabu.

(DWT/WKM)